

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA HIDROMETEOROLOGI

13

Yulia Indahri

Abstrak

Di penghujung tahun 2018, Indonesia mewaspadaai banjir dan tanah longsor sebagai dampak dari tingginya curah hujan. Kejadian di beberapa daerah di Indonesia yang diangkat media massa memperlihatkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan persiapan prabencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi Indonesia akan mengalami curah hujan dengan intensitas sedang hingga menengah tinggi. Kondisi ini tidak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena Indonesia memang berada di wilayah yang sensitif terhadap kondisi alam. Sudah saatnya kembali diingatkan agar penanggulangan bencana hidrometeorologi tidak hanya ditangani oleh pemerintah, tetapi juga secara khusus melibatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting yang harus dimulai sejak tahap prabencana. DPR RI perlu melakukan pengawasan dan memastikan bahwa dukungan anggaran dan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang penanggulangan bencana berjalan sesuai pedoman dan aturan yang berlaku.

Pendahuluan

Menjelang penghujung tahun 2018, Indonesia mewaspadaai banjir dan tanah longsor sebagai dampak dari tingginya curah hujan. Banjir akibat meluapnya sejumlah anak sungai di sub-daerah aliran sungai terus meluas dan sejak awal November mulai mengancam wilayah yang dilintasi alur sungai dan di antaranya juga mengakibatkan longsor. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hampir seluruh wilayah Indonesia

akan diguyur hujan dengan intensitas tinggi (Media Indonesia, 6 November 2018). Sejumlah daerah berpeluang mengalami bencana hidrometeorologi, seperti genangan, banjir, tanah longsor, banjir bandang, angin puting beliung, dan jalan licin (Media Indonesia, 13 November 2018).

Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah daerah perlu terus menyiagakan aparat dalam menghadapi bencana hidrometeorologi (Media Indonesia, 19 November 2018). Selanjutnya, sebagai bagian



dari solusi jangka panjang, partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam penanggulangan bencana. Contoh yang positif adalah masyarakat Kampung Lodan, Jakarta yang dengan kesadaran kolektif menata permukiman mereka (Media Indonesia, 21 November 2018). Tetapi hingga saat ini masih ada kekhawatiran bahwa penanggulangan bencana masih dalam tahap pembahasan saja, dan belum diterapkan secara menyeluruh.

Tulisan ini mengkaji bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana berdasarkan pedoman yang sudah secara komprehensif diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana). Secara khusus, partisipasi masyarakat sebelum bencana (prabencana) menjadi inti dari paparan ini.

Bencana Hidrometeorologi

Bencana hidrometeorologi (bencana alam meteorologi) adalah bencana alam yang berhubungan dengan iklim (Qodriyatun, 2013: 9). Bencana hidrometeorologi dapat berupa banjir, longsor, puting beliung, gelombang pasang, atau kekeringan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selama tahun 2017 terjadi 979 banjir, 848 tanah longsor, dan 886 puting beliung dari total 2.862 kejadian bencana.

Bencana hidrometeorologi dipicu oleh aktivitas aliran massa udara basah atau fenomena *Madden-Julian Oscillation* (MJO) dari Samudra Hindia sebelah barat Sumatera menuju ke wilayah Indonesia, terutama Indonesia bagian barat dan tengah yang menyebabkan kondisi atmosfer wilayah tersebut sangat

basah. Kondisi ini menyebabkan terjadinya potensi hujan lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang di sekitar wilayah Indonesia dalam periode 9 sampai dengan 14 November 2018. Potensi gelombang tinggi sebesar 2,5 meter hingga empat meter juga diperkirakan akan terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, dan Samudra Hindia Barat Bengkulu (Media Indonesia, 13 November 2018).

Dari pantauan cuaca, BMKG memprediksi wilayah Sumatera sampai Papua akan mengalami curah hujan dengan intensitas sedang hingga menengah tinggi. Sejumlah provinsi di Pulau Sumatera yang diprediksi mengalami peningkatan curah hujan adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, dan Lampung. Sementara itu, di Pulau Jawa ada Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur yang mengalami peningkatan curah hujan. Dampaknya, wilayah-wilayah tersebut berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi (Kompas.com, 6 November 2018).

Sampai saat ini, Aceh, Sumatera Utara (terutama di Pulau Nias), Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, bahkan di Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, serta Nusa Tenggara Timur sudah terkena banjir dan tanah longsor. Untuk Pulau Jawa, Gubernur Jawa Barat, menyatakan akan terus mempersiapkan diri karena berdasarkan perhitungan terdapat 60% bencana hidrometeorologi di Indonesia akan terjadi di Jawa Barat. Pimpinan daerah yang lain di Pulau Jawa juga terus berupaya mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana

hidrometeorologi termasuk dengan mempersiapkan relawan bencana (Media Indonesia, 7 November 2018).

Secara singkat dapat disampaikan bahwa banjir dapat disebabkan oleh kondisi alam yang statis seperti geografis, topografis, dan geometri alur sungai. Peristiwa alam yang dinamis seperti curah hujan yang tinggi, pembendungan dari laut atau pasang pada sungai induk, amblesan tanah dan pendangkalan akibat sedimentasi, serta aktivitas manusia yang dinamis seperti adanya tata guna di lahan dataran banjir yang tidak sesuai, yaitu dengan mendirikan pemukiman di bantaran sungai, kurangnya prasarana pengendalian banjir, amblesan permukaan tanah dan kenaikan muka air laut akibat *global warming* (Sastrodihardjo, 2012: 80).

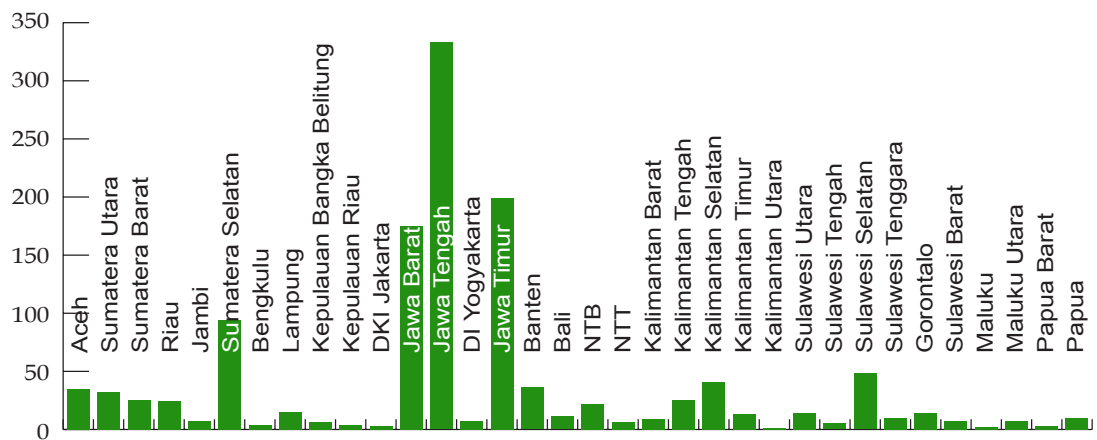
Sedangkan untuk tanah longsor, selama ini bencana tanah longsor dianggap sesuatu yang bersifat alamiah, mendadak dan tidak bisa dicegah. Akibatnya ketika terjadi bencana banyak masyarakat yang tidak siap sehingga mengakibatkan kerusakan besar bahkan kematian. Tanah longsor terjadi karena ada gangguan kestabilan pada tanah/batuan penyusun lereng. Penyebab longsor dapat dibedakan menjadi penyebab yang berupa gangguan

kestabilan lereng karena kondisi morfologi (terutama kemiringan lereng) dan juga karena adanya pemicu (BNPB, 2012: 22).

Selanjutnya untuk puting beliung, UU Penanggulangan Bencana dan peraturan turunannya mendefinisikan angin puting beliung sebagai angin kencang yang keluar berputar dari awan kumulonimbus secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40–50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3–5 menit).

Hampir semua tempat yang ada di Indonesia rawan bencana puting beliung. Namun meski begitu ada beberapa tempat yang lebih sering diserang oleh angin puting beliung jika dibandingkan dengan tempat yang lain. Puting beliung sering terjadi di Nusa Tenggara, Sumatera, serta Sulawesi. Pulau Jawa juga termasuk tempat yang sering diserang oleh angin puting beliung, terutama di wilayah Jawa Barat (Banjar, Ciamis, Garut, Tasik, Sukabumi, dan Sumedang) (BNPB, 2016: 101).

Guna memahami provinsi yang paling sering mengalami bencana, data pada Gambar 1 untuk tahun 2018 (sampai 14 November 2018),



Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, <http://dibi.bnpb.go.id/dibi/>, diakses 14 November 2018.

Gambar 1. Kejadian Bencana per Provinsi, 2018

dapat dijadikan perbandingan. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat merupakan tiga provinsi dengan jumlah kejadian bencana tertinggi di tahun 2018.

Partisipasi Masyarakat

Secara umum kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan bencana dimulai dari pencegahan, pengurangan dampak bahaya, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi), dan pembangunan berkelanjutan yang mengurangi risiko bencana. Berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan (2011: 15), penanggulangan bencana adalah pengelolaan penggunaan sumber daya yang ada untuk menghadapi ancaman bencana dengan melakukan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di setiap tahap penanggulangan bencana yaitu sebelum, saat kejadian, dan pascabencana.

Sebagai upaya mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, maka kegiatan prabencana yang perlu menjadi perhatian adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa yang harus dilakukan dalam tahapan persiapan bencana. Kegiatan prabencana terdiri atas kegiatan ketika tidak terjadi bencana (kegiatannya adalah pencegahan dan mitigasi) dan kegiatan ketika ada potensi terjadi bencana (kegiatannya berupa kesiapsiagaan) (Indahri, 2017: 113).

Pada tahap sebelum terjadi bencana terdapat kegiatan peringatan dini, di mana dalam kegiatan peringatan dini ini, masyarakat diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan segera bertindak bila

terjadinya perubahan karakteristik/ciri-ciri alami yang mengisyaratkan akan terjadinya bencana. Kegiatan ini telah dilakukan juga oleh pemerintah dengan terus memberikan informasi melalui media massa mengenai potensi bencana hidrometeorologi.

Mitigasi sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana selain dilakukan dengan memberikan peringatan dini juga dengan meningkatkan kualitas fisik (mitigasi struktural) infrastruktur (Media Indonesia, 16 November 2018). Hal ini juga sudah dilakukan pemerintah (terutama pemerintah daerah) dengan membersihkan gorong-gorong (Jakarta), memperbaiki jembatan dan jalan penghubung (Jawa Tengah), mempersiapkan jajaran pemerintah daerah dalam mengantisipasi banjir dan longsor (Jawa Barat) (Kompas.com, 6 November 2018), serta membuat peraturan daerah khusus untuk menghadapi bencana hidrometeorologi (Media Indonesia, 15 November 2018).

Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghadapi kemungkinan atau mengantisipasi datangnya bencana melalui serangkaian kegiatan peningkatan kemampuan untuk menghadapi kemungkinan bencana atau melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (BNPB, 2006: 123). Pada kegiatan ini, masyarakat diimbau agar menyiapkan peralatan yang sangat diperlukan untuk usaha mengatasi bencana. Untuk bencana hidrometeorologi diperlukan bak air, pasir, alat rumah tangga dari bahan mudah mengapung, serta mengadakan latihan-latihan keterampilan penanggulangan bencana.

Penutup

Pelibatan masyarakat sejak awal menjadi tujuan dari penanggulangan bencana yang sangat tepat karena sejak awal masyarakat akan mengetahui semua langkah penanggulangan bencana sehingga dapat mengurangi ancaman, mengurangi dampak, menyiapkan diri secara tepat bila terjadi ancaman, menyelamatkan diri, memulihkan diri, dan memperbaiki kerusakan yang terjadi agar menjadi masyarakat yang aman, mandiri, dan berdaya tahan terhadap bencana.

Manajemen bencana yang proaktif membutuhkan lebih banyak partisipasi semua pihak, terutama partisipasi masyarakat. Akan lebih banyak usaha dan waktu yang diperlukan selain juga dukungan anggaran, peralatan, fasilitas dan sumber daya manusia yang mengarah pada integrasi manajemen bencana banjir baik untuk kegiatan jangka panjang maupun jangka pendek. Peran DPR RI adalah memastikan bahwa dukungan anggaran dan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang penanggulangan bencana berjalan sesuai pedoman dan aturan yang berlaku. Masyarakat harus terus diimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan dari bencana hidrometeorologi.

Referensi

- “Anies Segera Tata Bantaran Kali Pademangan”, *Media Indonesia*, 21 November 2018, hal. 10.
- BNPB. (2006). *Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) 2006–2009*. Jakarta: BNPB.
- BNPB. (2012). *Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*. Jakarta: BNPB.

- BNPB. (2016). *Risiko Bencana Indonesia*. Jakarta: BNPB.
- “Banjir dan Tanah Longsor Ancam Daerah”, *Media Indonesia*, 7 November 2018, hal. 19.
- “Daerah Memaksimalkan Siaga Bencana”, *Media Indonesia*, 19 November 2018, hal. 18.
- “DKI Setujui Bantuan Keuangan untuk Gorong-gorong Tol Kali Buaran”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/11/06/18325311/dki-setujui-bantuan-keuangan-untuk-gorong-gorong-tol-kali-buaran>, diakses 14 November 2018.
- Indahri, Yulia. (2017). “Penanggulangan Bencana dan Peran Masyarakat” dalam M. Ali Yusuf. *Telaah Konsep Penanggulangan Bencana Indonesia*. Jakarta: Puslit BKD dan Intelgensia Intrans Publishing.
- “Infrastruktur Terancam Dampak Banjir”, *Media Indonesia*, 16 November 2018, hal. 18.
- “Jakarta Siap Tangani Banjir”, *Media Indonesia*, 13 November 2018, hal. 10.
- “Jalan Putus, 10 Nagari Terisolasi”, <https://regional.kompas.com/read/2018/11/06/23061001/jalan-putus-10-nagari-terisolasi>, diakses 14 November 2018.
- Kementerian Kesehatan. (2011). *Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- “Masih Ada Potensi Longsor di Tasikmalaya”, *Media Indonesia*, 21 November 2018, hal. 19.
- Qodriyatun, Sri N. (2013). “Bencana Hidrometeorologi dan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim”, *Info Singkat*, Vol. V, No. 10, hal. 9-12.
- Sastrodihardjo, Siswoko. (2012). *Upaya Mengatasi Masalah Banjir Secara Menyeluruh*. Jakarta: Mediatama Saptakarya.

“Satu Keluarga Tertimbun Longsor”,
Media Indonesia, 13 November
2018, hal. 18.

“Sumsel akan Buat Perda Resapan Air”,
Media Indonesia, 15 November 2018,
hal. 18.

“Waktunya Siaga Banjir dan Tanah
Longsor”, *Media Indonesia*, 6 November
2018, hal. 18.

Zamani, Labib. “Hadapi Musim Hujan, Ini
Daerah Rawan Longsor dan Banjir di
Boyolali”, <https://regional.kompas.com/read/2018/11/06/20292801/hadapi-musim-hujan-ini-daerah-rawan-longsor-dan-banjir-di-boyolali>,
diakses 14 November 2018.



Yulia Indahri
yulia.indahri@dpr.go.id

Yulia Indahri, S.Pd., M.A. Penulis adalah peneliti Studi Masyarakat dan Sosiologi Perkotaan di Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Menyelesaikan studi S-1 Teknologi Pendidikan di IKIP Jakarta dan magister Development Studies di University of East Anglia, Norwich. Beberapa karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah “Peran Parlemen dalam Penanggulangan Kemiskinan”, “Permasalahan Organisasi Profesi Guru”, serta “Penanggulangan Bencana dan Peran Masyarakat”.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.